

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP ALASAN PERCERAIAN DI  
LUAR UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974  
PASAL 39 JUNETO PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9  
TAHUN 1975 PASAL 19**

**Skripsi**

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna  
Mendapatkan Gelar Sarjana (S.1.)  
Dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh :

**DASEF UBAIDILLAH**

**NPM : 1621010033**

**Prodi: Hukum Keluarga (Al-Akhwal Syakhsiyyah)**



**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1441H/2020**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP ALASAN PERCERAIAN DI  
LUAR UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN  
1974 PASAL 39 JUNETO PERATURAN PEMERINTAH  
NOMOR 9 TAHUN 1975 PASAL 19**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-tugas dan Melengkapi Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.1.)**

**Dalam Ilmu Syariah**

Oleh :

**Dasef Ubaidillah  
NPM : 1621010033**

**Prodi : Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Syakhshiyah)**

**Pembimbing I : Dr. H. Bunyana Sholihin, M.Ag.**

**Pembimbing II : Eti Karini, S.H, M.Hum.**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1441H/2020 M**

## ABSTRAK

Pada hakikatnya suatu pernikahan dapat putus karena beberapa alasan seperti putus perkawinan karena perceraian. Tentang alasan perceraian disebutkan beberapa alasan perceraian sebagaimana telah disebutkan juga dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 tentang alasan perceraian. Tidak semua alasan disebutkan secara rinci yang termuat dalam UU Perkawinan 1974 Jo Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 Namun dalam realita kehidupan masyarakat alasan perceraian bisa saja timbul karena alasan lain yang tidak disebutkan baik dalam UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 Jo Pasal 19 PP No. 19 Tahun 1975 dan juga kompilasi hukum Islam seperti alasan perceraian karena: 1. Faktor ekonomi, 2. Tidak ada lagi kecocokan, 3. Mertua selalu ikut campur urusan rumah tangga yang banyak dijumpai di kehidupan masyarakat. Dari sedikit ulasan diatas dapat ditarik suatu permasalahan yang ingin penulis kaji, yaitu: 1. Bagaimana penerapan putusan terhadap perceraian dengan alasan di luar ketentuan UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasal 39 jo No.9 Tahun 1975 PP Pasal 19. ?, 2. Bagaimana relevansi peraturan UU Perkawinan No 1 tahun 1974 jo Pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 tentang alasan-alasan yang dapat menyebabkan perceraian dalam kehidupan masyarakat masa kini?. Tujuan penelitian ini adalah 1. ingin mengetahui sejauh mungkin tentang penerapan putusan perceraian diluar alasan-alasan perceraian yang tertuang dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19, 2. Ingin mengetahui tentang relevansi alasan-alasan perceraian dalam PP No. 19 Tahun 1975 Pasal 19. Penelitian ini bersifat *deskriptif analisis* yaitu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data yang telah terkumpul sebagaimana adanya. Sedangkan jenis penelitian yaitu *library research* dimana peneliti mengumpulkan data melalui informasi yang bersumber dari buku-buku, selanjutnya menganalisis data. Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian Hukum Normatif dan menggunakan pendekatan *kualitatif*. Dengan sumber data yang diperoleh melalui data, primer dan data skunder. Data Primer adalah data yang bersumber dari UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 PP No.9 Tahun 1975. Adapun data sekunder adalah data yang bersumber dari Koran, karya ilmiah, buku, serta sumber pustaka lainnya sumber pustaka, jurnal dan lainnya. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa: 1. penerapan putusan terhadap alasan perceraian di luar ketentuan UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasal 39 jo Pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 perceraian dapat diputus melalui putusan Pengadilan Agama walaupun alasan tersebut tidak terdapat dalam ketentuan Pasal 39 jo Pasal 19 PP No.19 Tahun 1975 tetapi masih erat kaitannya dengan alasan yang disebutkan dalam pasal tersebut dan majelis Hakim dapat memutus perkara tersebut dengan berpegang pada Pasal 5 ayat (1) UU kekuasaan kehakiman. 2. relevansi peraturan UU Perkawinan No 1 tahun 1974 jo Pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 tentang alasan-alasan yang dapat menyebabkan perceraian dalam kehidupan masyarakat masa kini sudah tidak relevan dengan kehidupan masyarakat karena alasan-alasan yang tertuang dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 hanya sebagai jembatan saja maka majelis Hakim dapat mempertimbangkan sehingga gugatan dapat diterima atau ditolak dan tidak terpaku pada Undang-Undang Perkawinan saja.





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS SYARI'AH**

*Jln. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Telp (0721)703289*

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi :** Analisis Hukum Islam Terhadap Alasan Perceraian Di Luar Undang-Undang Perkawinan Pasal 39 Juneto Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Pasal 19

**Nama Mahasiswa :** Dasef Ubaidillah

**NPM :** 1621030133

**Program Studi :** Hukum Keluarga Islam

**Fakultas :** Syari'ah

**MENYETUJUI**

Untuk di munaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang  
Munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Dr. H. Bunyana Sholihin, M.Ag.**

**NIP. 195707051989031001**

**Pembimbing II**

**Eti Karini, S.H M.Hum.**

**NIP.197308162003121003**

**Mengetahui,**

**Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah**

**H. Rohmat, S.Ag., M.H.I**

**NIP. 1974090202003121003**





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS SYARIAH**

*Jln. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame Bandar Lampung, Telp (0721) 703289*

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP ALASAN PERCERAIAN DI LUAR Undang-Undang PERKAWINAN PASAL 39 Juneto Peraturan Pemerintah No. 9 TAHUN 1975 PASAL 19** disusun oleh, **Dasef Ubaidillah, NPM: 1621010033** Program studi Muamalah, Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan pada Hari, **selasa, 28-juli-2020.**

**Tim Penguji**

**Ketua : Marwin., S.H.,M.H.**

**Sekretaris : Ahmad Sukandi., M.H.I.**

**Penguji Utama : Dra. Firdaweri., M.H.I.**

**Penguji I : Dr. H. Bunyana Sholihin., M.Ag.**

**Penguji II : Eti Karini., S.H.,M.Hum.**

**Mengetahui,**

**Dekan Fakultas Syariah**



**Dr. H. Khairuddin., M.H.**

**NIP. 196210221993031002**

## MOTTO

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ  
الطَّلَاقِ (رواه ابوداود)

*“Dari Ibnu Umar ra bahwa Rasulallah SAW bersabda suatu perbuatan halal  
yang amat dibenci allah azza wa zalla adalah thalak (perceraian)”.*

(H.R. Abu Dawud: 2178).





## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan sebagai bentuk ungkapan rasa syukur dan terima kasih yang sangat mendalam kepada:

1. Kedua orangtuaku tercinta, Ayah Ali Fahmi dan Ibu Yunita Alm yang telah membesarkan, mendidik, menyayangi, memberi semangat, dukungan, motivasi dan tak hentinya selalu mendo'akan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini
2. Kakak ku Zulfa Ali Amd,Keb yang telah memberikan bantuannya baik formil dan materil tenaga serta memotivasi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah ini
3. Kedua Kakek dan Nenek Ku tercinta, Bapak M.Thalib Dan Ibu Suraimah yang selalu memberikan semangat dan dukungan, dan juga mootivasi kepada penulis
4. Bibi ku Herpita Diana, Novita Sari, Jemy Susanti, Lispanidah, dan juga pamanku Jutawan, Hadiyanto, Albert yang selalu memberikan saran dan membangkitkan semangat penulis dalam proses menyelesaikan skripsi ini;

## **RIWAYAT HIDUP**

Nama lengkap Dasef Ubaidillah, lahir di desa tekad, Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus yang terletak di Provinsi Lampung, pada tanggal 09 desember 1998 merupakan anak kedua dari dua bersaudara yang merupakan putra dari Ayah Ali Fahmi dan Ibu Yunita, menempuh pendidikan sebagai berikut :

1. Taman Kanak-Kanak Darma Wanita Desa Tekad, Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus yang terletak di Provinsi Lampung pada tahun 2001-2003.
2. Sekolah Dasar Negeri 1 Tekad Desa Tekad, Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus yang terletak di Provinsi Lampung 2004-2010.
3. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Talang Padang Desa Tekad, Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus Yang Terletak Di Provinsi Lampung pada tahun 2011-2013.
4. Sekolah Madrasah Aliyah Negeri, Pringsewu pada tahun 2013-2016.
5. Melanjutkan kuliah di Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada April 2016.



## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah atas izin Allah S.W.T, puji syukur tak lupa saya panjatkan atas segala rahmad, nikmat-nikmat yang dikaruniakan Allah S.W.T, kepada saya, baik nikmat kesehatan, ilmu, semangat, rezeki, petunjuk dan kelancaran sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul Analisis Hukum Islam Terhadap Alasan Perceraian diluar Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Juneto Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19. Shalawat serta salam tak henti-hentinya tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, para keluarga dan sahabat, beserta pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini disusun dan diselesaikan agar menjadi persyaratan dalam menyelesaikan studi program Strata Satu (S1) Jurusan Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syari'ah.

Penulis hanturkan terima kasih kepada para pihak yang senantiasa membantu baik dalam materil dan inmateril dalam proses penyelesaian skripsi ini. Berikut ungkapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. H. Khairudin Tahmid., M.H. selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung;
2. Bapak H. Rohmat, S.Ag., M.H.I. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Bapak Abdul Qodir Zaelani., S.H,I, M.A. Selaku Sekretaris

Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung;

3. Bapak Dr. H. Bunyana Sholihin., M.Ag. selaku pembimbing I dan Ibu Eti Karini., S.H. M.Hum selaku pembimbing II yang telah rela meluangkan waktu untuk membimbing penulis dan memberikan arahan demi selesainya skripsi ini;
4. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan segenap pegawai Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung;
5. Sahabat, teman, dan partner Dian Edi Putri., S.H, yang telah menemani dan memberikan masukan di setiap tahap dalam proses penyelesaian skripsi ini hingga selesai;
6. Sahabat seperjuangan yang tidak bisa disebutkan satu per-satu.
7. Teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga Islam A angkatan 2016;

Semoga Allah S.W.T memberikan teman-teman seperjuangan kemudahan dalam menimba ilmu dan selalu diberikan kelancaran dalam proses penyusunan karya ilmiah skripsi. Penulis berharap skripsi ini dapat menjadi sumbangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum keluarga Islam.

Bandar Lampung, 24-Juni-2020

Penulis

Dasef Ubaidillah  
NPM.1621010033

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN.....</b>	<b>v</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	3
C. Latar Belakang Masalah .....	4
D. Fokus Penelitian .....	11
E. Rumusan Permasalahan .....	11
F. Tujuan penelitian .....	12
G. Signifikasi Penelitian.....	12
H. Metode Penelitian .....	13

### **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Perceraian menurut Hukum Islam	
1. Pengertian Perceraian.....	16
2. Dasar Hukum Perceraian dalam Islam .....	18
3. Sebab putusnya perkawinan dalam Islam .....	21
4. Macam-macam thalak .....	25
B. Tinjauan Pustaka .....	32

### **BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

A. Sejarah singkat UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974.....	35
B. Pengertian Perceraian Menurut Hukum Positif	
1. Pengertian Perceraian menurut UUP.....	44



2. Dasar hukum perceraian menurut UUP .....	46
3. Rukun dan Syarat perceraian.....	46
4. Macam-Macam Perceraian Dalam Hukum Positif Indonesia .....	50
5. Alasan-alasan perceraian menurut PP 19 Tahun 1975.....	51
6. Prosedur perceraian .....	56
C. Akibat Hukum dari adanya Perceraian .....	58
D. Putusan Hakim .....	59
1. Putusan No: 0116/Pdt.G/2009/PA.Pas. ....	59
2. Amar putusan perkaraNo:0116/Pdt.G/2009/PA.Pas. ....	61

#### **BAB IV ANALISIS PENELITIAN**

A. Analisis UU perkawinan No.1 Tahun 1974 Jo PP Pasal 19 Nomor. 9 Tahun 1975 alasan-alasan putusnya perceraianPerfektif Hukum Islam Hukum Positif.....	64
B. Relevansi alasan-alasan perecraian berdasarkan UUPerkawinan No.1 Tahun 1974 Jo PP Pasal 19 Nomor. 9 Tahun 1975 . ....	70

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	74
B. Rekomendasi .....	75

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

Putusan No: 0116/Pdt.G/2009/PA.Pas.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Penegasan Judul

Sebelum penulis menjelaskan lebih lanjut dan menguraikan tentang isi skripsi ini, terlebih dahulu penulis akan menjelaskan pengertian yang terkandung dalam judul skripsi ini. Skripsi dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Alasan Perceraian di luar Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 Pasal 39 Juncto Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19”

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa karangan, pembuatan dsb untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya sebab-musabab, duduk perkaranya, menguraikan suatu pokok atas berbagai bagiannya dan perlahan bagiannya dan perlahan bagian itu sendiri serta hubungan antarbagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan; penyelidikan kimia dengan menguraikan sesuatu untuk mengetahui zat bagiannya dsb; penjabaran sesudah dikaji sebaik-baiknya; pemecahan persoalan yang dimulai dengan dugaan akan kebenarannya;<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Waridah Ernawati, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta Selatan : Imprint Kawan Pustaka, 1991) h.110.

Hukum Islam yaitu suatu yang diisyaratkan oleh Allah S.W.T, dengan tujuan merealisasikan dan melindungi kemaslahatan umat manusia, baik itu individu maupun masyarakat.<sup>2</sup>

Undang-Undang perkawinan adalah suatu peraturan-peraturan yang dibuat sesuai dengan falsafah pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum nasional, tentang perkawinan yang berlaku bagi semua warga Negara.<sup>3</sup>

Undang-Undang Perkawinan Pasal 39 Jo Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 Pasal 19 yaitu peraturan pemerintah yang berisikan tentang beberapa alasan diperbolehkan melakukan perceraian:

1. salah satu diantara keduanya berbuat zina, :
2. pemabuk, penjudi dan lain sebagainya,
3. salah satunya meninggalkan selama dua tahun berturut-turut tanpa sepengetahuan salah satu diantaranya,
4. salah satu diantara keduanya terkena hukuman pidana minimal 5 tahun atau lebih,
5. satu diantara keduanya mendapatkan cacat badan, suami melanggar talik talak, salah satu diantara keduanya mendapatkan kekerasan fisik dan selalu bertengkar dan tidak ada lagi kecocokan, atau

---

<sup>2</sup>Husin, Said Agil, *Hukum Islam Dan Pluralitas Sosial*, (Jakarta: Penamadani,; 2004). h.21.

<sup>3</sup>Azhari, Akmal Tarigan, *Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fiqh, UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Sampai KHI*(Jakarta: Kencana, 2004), h.26.



6. salah satu diantaranya murtad.<sup>4</sup>

Dari uraian yang dimaksud dari judul ini adalah suatu penyelidikan atau penelitian ilmiah yang lebih mendalam mengenai relevansi terhadap alasan-alasan perceraian yang disebutkan pada UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasal 39 Jo. PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 tentang beberapa alasan diperbolehkannya melakukan perceraian namun terkadang Perceraian dapat disebabkan dengan alasan-alasan diluar dari ketentuan atau yang telah disebutkan dalam PP No.9 tahun 1975 Pasal 19 maka diperlukan pengkajian lebih lanjut apakah pecceraian diluar dari ketentuan yang telah disebutkan pada PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 tidak diperkenankan dilakukan ataukah perlu adanya suatu pembaharuan terhadap beberapa alasan diperbolehkannya melakukan perceraian berdasarkan yang telah tertuang dalam UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 Jo PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19.

## **B. Alasan Memilih Judul**

### **1. Alasan Objektif**

Adalah mengkaji secara lebih mendalam dengan cara melakukan penelitian secara ilmiah mengenai gugatan perceraian dengan alasan yang tidak tertuang dalam UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 Jo PP Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 seperti perceraian dengan alasan karena rendahnya faktor ekonomi. Dan menguji apakah alasan-alasan yang disebutkan dalam

---

<sup>4</sup> Ahmad Rhofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta, rajawali pers, 2015), h.217.

UU perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasal 39 Jo PP Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 dan Kompilasi Hukum Islam masih relevan digunakan dalam kehidupan masyarakat.

## 2. Alasan Subyektif

Dari permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji judul tersebut karna dilingkungan kampus UIN Raden Intan Lampung belum ada yang membahas permasalahan tersebut.

### C. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri, pada hakikatnya manusia selalu memerlukan bantuan antara satu dengan lainnya, dalam kehidupan sosial manusia cenderung ingin meneruskan keturunannya, Islam telah menganjurkan setiap mukmin untuk menikah sebagaimana firman Allah SWT .QS. An-Nisaa'[4]: 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبً

*Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan isterinya; dan daripada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.*

*(Q.S. An-Nisaa' [4] :1).*

Akad perkawinan dalam Hukum Islam bukanlah perkara perdata semata, melainkan ikatan suci (*misaqan galiza*). Namun sering kali apa yang menjadi tujuan perkawinan kandas diperjalanan. Perkawinan harus putus di tengah jalan, karena makna dasar sebuah akad nikah adalah ikatan atau dapat juga dikatakan perkawinan pada dasarnya kontrak.<sup>5</sup> Konsekuensinya yakni dapat lepas yang kemudian dapat disebut dengan talak. Perceraian hanya dikatakan sah setelah adanya Menurut istilah, seperti yang dituliskan *Al-Jaziri*, talak adalah melepaskan ikatan (*hall al-qaid*) atau bisa disebut pelepasan ikatan dengan menggunakan kata-kata yang telah ditentukan.<sup>6</sup>

Suatu perkawinan dapat diputus dan berakhir karena berbagai hal, antara lain karena beberapa hal yakni terjadinya talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap isterinya, atau karena perceraian yang terjadi antara keduanya, atau karena sebab-sebab lain yang menyebabkan tidak ada lagi kerhamonisan dalam rumah tangga, sehingga menyebabkan pihak suaminya maupun isteri menjadi tidak betah lagi untuk membina rumah tangga bersama dan memutuskan untuk berpisah.<sup>7</sup>

Perceraian juga disebut dengan Talak, adapun pengertian talak yaitu hilangnya suatu ikatan perkawinan sehingga suami tidak dapat lagi menggauli istrinya dan istri tidak lagi halal untuk suaminya ini terjadi pada

---

<sup>5</sup> Ahmad Kuzri, *Perkawinan Sebagai Sebuah Ikatan*, (Jakarta: rajawali pers, 1995) h.206.

<sup>6</sup> Abdurrahman *Al-jaziri*, *Kitab Al-fiqh'ala Mazahib Al-arba'ah*, Juz IV, (Kairo: Dar Al-pikr), h. 278.

<sup>7</sup> H.MA. Tihami, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013) H.229.



talak *ba'in*. Talak *ba'in* ini terbagi menjadi dua talak *ba'in sughra* dan talak *ba'in kubra*. Talak *ba'in sughra* adalah talak yang menghilangkan hak-hak rujuk dari bekas suaminya, tetapi tidak menghilangkan hak nikah baru kepada bekas istrinya.<sup>8</sup> Sedangkan talak *ba'in kubra* adalah talak yang menghilangkan hak-hak rujuk dari bekas suaminya, walaupun kedua bekas suami istri tersebut ingin melakukannya, baik diwaktu iddah ataupun sesudahnya, sedangkan definisi dalam talak *raj'i* adalah mengurangi ikatan perkawinan atau dengan kata lain berkurangnya hak talak yang dimiliki suami dalam menjatuhkan talak terhadap istrinya. pada talak *raj'i* suami masih mempunyai hak untuk merujuk kembali istrinya sesuai dengan firman Allah SWT dalam Qs Al-Thalaq [65] Ayat 1 :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

*Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru. (Q.S. Al-Thalaq [65]:1)*

---

<sup>8</sup>Slamet Abidin, *Fikih Munakahat* 2, (Jakarta: Rajawali pers, 1995), h,16.

Ulama berbeda pendapat tentang hukum melakukan thalak. Menurut pendapat yang paling shahih (Mazhab Hanafi dan Hambali), bahwa talak itu hukumnya makruh, kecuali darurat, berdasarkan sabda Rasulullah SAW;

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْعَضُ الْخَلَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ  
الطَّلَاقِ (رواه ابوداود)

*Perbuatan halal yang paling dibenci Allah azza wajalla adalah talak*

(HR Abu Daud dan Al-Hakim: (2178).<sup>9</sup>

Hadits tersebut menunjukkan bahwa talak atau perceraian, merupakan alternatif terakhir sebagai “pintu darurat” yang boleh ditempuh, manakala bahtera kehidupan rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan keutuhan dan kesinambungannya.<sup>10</sup> Jumhur ( Mazhab Maliki, Syafi’i dan Hambali) menyebutkan, sesungguhnya thalak adalah perkara yang boleh, dan selayaknya tidak dilakukan, karena dia mengandung pemutusan rasa dekat kecuali karena ada sebab. Yang dimaksud dengan perkara yang halal yaitu perkara yang bukan perbuatan yang lazim, dan mencakup perkara perkara mubah sunah wajib makruh. Perceraian hanya dikatakan sah setelah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebenarnya putusannya perkawinan merupakan hal wajar saja, dengan kata lain perceraian harus melalui pengadilan, tidak bisa tidak. Namun, tidak mudah untuk menggugat dan mengajukan permohonan cerai gugat ke pengadilan.

---

<sup>9</sup> Djamil Latifa, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981), h.48.

<sup>10</sup> *Ibid* h.49

Menurut hukum harus ada alasan-alasan yang cukup, sehingga gugatan cerai bisa dikabulkan Pengadilan.

Dalam kitab-kitab fiqh, ada empat kemungkinan yang dapat memicu perceraian yang dapat terjadi dalam kehidupan rumah tangga yaitu:

1. Apabila terjadinya nusyuz yang dilakukan istri
2. *Nusyuz* istri terhadap suami
3. Terjadinya *syiqaq*
4. Salah satu pihak melakukan perbuatan zina (*fakhisyah*), yang menimbulkan saling tuduh-menuduh diantara keduanya.<sup>11</sup>

Dalam Hukum Positif terdapat beberapa alasan sebab putusnya perkawinan dengan perceraian seperti yang disebutkan dalam UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 Jo PP Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 tentang perkawinan dan tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 116 serta diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 36, dan hal-hal teknis lainnya dalam peraturan Menteri Agama (Permenag) Nomor 3 Tahun 1975. disebutkan putusnya ikatan perkawinan dapat terjadi antara lain sebagai berikut:

- a. Salah satu diantara keduanya berbuat zina,
- b. Pemabuk, penjudi dan lain sebagainya,
- c. Salah satunya meninggalkan selama 2 tahun berturut-turut tanpa sepengetahuan salah satu diantaranya,

---

<sup>11</sup>Madani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016), h.146-147.

- d. Salah satu diantara keduanya terkena hukuman pidana minimal 5 tahun atau lebih,
- e. Satu diantara keduanya mendapatkan cacat badan, suami melanggar talik talak, salah satu diantara keduanya mendapatkan kekerasan fisik dan selalu bertengkar dan tidak ada lagi kecocokan, atau
- f. Salah satu diantaranya murtad.<sup>12</sup>

Dalam beberapa kenyataannya kehidupan masyarakat selain beberapa alasan disebutkan di atas perceraian juga kadang dapat terjadi dengan alasan-alasan lain seperti faktor ekonomi, kurang tercukupinya nafkah yang diberikan dan lainnya. Faktor ekonomi juga bisa menjadi dasar alasan salah satu diantara kedua belah pihak untuk mengajukan gugat cerai. Sedangkan alasan perceraian karena rendahnya faktor ekonomi atau alasan-alasan lain tidak tertuang kedalam UU perkawinan No.1 Tahun 1974 Pasal 39 Jo PP Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 di Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam. Dari permasalahan diatas maka penulis mengangkat skripsi dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Alasan Perceraian di Luar UU perkawinan Pasal 39 Juneto PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19”

---

<sup>12</sup>Ahmad Rhofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*,(Jakarta, rajawali pers, 2015), h.217.



#### **D. Fokus penelitian**

Dari latar belakang permasalahan tersebut maka penelitian ini lebih memfokuskan kepada isi dari UU Perkawinan Pasal 39 Jo PP Tahun 1975 Pasal 19 tentang beberapa alasan diperbolehkan melakukan gugatan perceraian dan juga menganalisis apakah isi dalam pasal tersebut butuh pembaharuan, penambahan atau penyesuaian di era kehidupan masyarakat masa kini yang penuh dengan problematika yang bermacam-macam dan juga apakah sesuai dengan syariat ajaran agama Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia dan apakah diperbolehkan melakukan perceraian diluar ketentuan UU Perkawinan Pasal 39 Jo PP Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 maka, penelitian akan memfokuskan penelitian pada “Analisis Hukum Islam Terhadap Alasan Perceraian di Luar PP Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19”

#### **E. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan diatas maka penulis merumuskan pokok permasalahannya yang akan menjadi kajian selanjutnya yaitu identifikasi masalah dan batasan masalah, maka penulis merumuskan masalah yaitu :

1. Bagaimana Penerapan Putusan Terhadap Perceraian Dengan Alasan Diluar Ketentuan UU Perkawinan Pasal 39 Jo PP Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 ?

2. Bagaimana relevansi UU Perkawinan Pasal 39 Jo PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 Tentang Alasan-Alasan Yang Dapat Menyebabkan Perceraian dalam kehidupan masyarakat masa kini?

#### **F. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian merupakan rumusan kalimat yang menunjukkan hasil, sesuatu yang diperoleh setelah penelitian selesai, sesuatu yang akan dicapai atau dituju dalam sebuah penelitian.<sup>13</sup> penulisan skripsi ini bertujuan menganalisa dan mengkaji secara lebih mendalam terhadap isi PP Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 tentang beberapa alasan-alasan mengajukan gugat cerai, namun tidak tercantum dalam pasal tersebut yang dapat menyebabkan putusnya perkawinan di tinjau berdasarkan Hukum Islam. Selain beberapa tujuan diatas penulis juga ingin memberikan pemahaman kepada setiap pembaca dan khususnya masyarakat luas agar lebih memahami mengenai beberapa alasan sebab putusnya perkawinan.

#### **G. Signifikasi penelitian**

kegunaan dari penulisan skripsi yang ingin penulis sampaikan yaitu memberikan informasi kepada pengkaji ilmu hukum serta memberikan pemahaman kepada setiap pembaca dan khususnya masyarakat luas agar lebih memahami mengenai beberapa alasan atau sebab-sebab putusnya perkawinan dilihat dari sudut pandang Hukum Islam dan Hukum Positif.

---

<sup>13</sup> *Pedoman Penulisan Skripsi*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2017/2018

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara untuk memahami sesuatu dengan melalui penyelidikan atau melalui usaha mencari bukti-bukti yang muncul sehubungan dengan masalah itu yang dilakukan secara hati-hati sekali sehingga diperoleh pemecahannya.<sup>14</sup> Atau secara singkat yang dimaksud metode penelitian adalah cara atau jalan yang dilewati untuk meneliti atau mencari suatu jawaban atas suatu permasalahan atau gejala sosial yang ada sehingga dapat memahami suatu permasalahan secara mendalam.<sup>15</sup> Dalam melakukan penelitian skripsi ini maka penulis menggunakan beberapa cara atau metode-metode sebagai berikut:

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian menggunakan pendekatan berupa pendekatan normatif sehingga data yang diperoleh berupa deskriptif analisis sedangkan jenis penelitian ini menggunakan literatur merupakan *library research* yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku, koran, majalah, karya ilmiah, *e-journal* atau *e-book* dan lain-lain sebagai sumber data pokoknya untuk dapat meneliti pada suatu fenomena atau gejala sosial yang ada.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian* (Jogjakarta: CV Andi Offset, 2010), h. 3.

<sup>15</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h.2.

<sup>16</sup> Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian & Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), h.10.

## 2. Sumber data Penelitian

Dalam proses penelitian ini, penulis menggunakan beberapa sumber data sebagai pusat informasi pendukung dan pelengkap sumber data tersebut adalah sebagai berikut:

### a. Sumber data primer

Data primer adalah data pokok yang berkaitan dengan data penelitian yang didapatkan dari UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 Jo PP Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19, dan dengan data-data pendukung lainnya seperti Kompilasi Hukum Islam Pasal 116, buku-buku serta literatur lainnya yang dijadikan acuan dalam mengkaji suatu titik permasalahan yang menjadi fokus pembahasan skripsi ini.

### b. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah suatu sumber data yang menjadi bahan penunjang dan berguna untuk melengkapi suatu analisa penelitian. Dimana dalam penelitian ini yang menjadi bahan sekunder adalah buku-buku referensi, jurnal, dan referensi lain yang bersangkutan dengan penelitian ini.

## 3. Teknik pengumpulan data

Karena penelitian ini merupakan penelitian *Library Research* dan metode yang digunakan yaitu metode kualitatif, maka teknik

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data *literer* yaitu mengumpulkan bahan-bahan pustaka yang berkesinambungan dengan objek pembahasan yang diteliti. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dikumpulkan dan diolah dengan cara:

- a. *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali data-data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasannya yang kemudian dihimpun dan disempurkan sehingga penelitian ilmiah ini dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.
- b. *Organizing* yakni menyusun data-data yang diperoleh dengan kerangka yang sudah ditentukan.
- c. Penemuan hasil penelitian yaitu menganalisis yang berkelanjutan terhadap hasil penusunan data dengan menggunakan kaidah-kaidah, teori-teori yang telah ditentukan sehingga memperoleh suatu kesimpulan dan jawaban dari rumusan permasalahan.<sup>17</sup>

#### 4. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis isi (*content Analisis*) analisis isi adalah suatu teknik penelitian untuk membuat kesimpulan-kesimpulan yang dapat ditiru dengan data yang valid, dengan memperhatikan konteksnya. Metode ini dimaksudkan untuk menganalisis seluruh pembahasan mengenai apa saja alasan-alasan

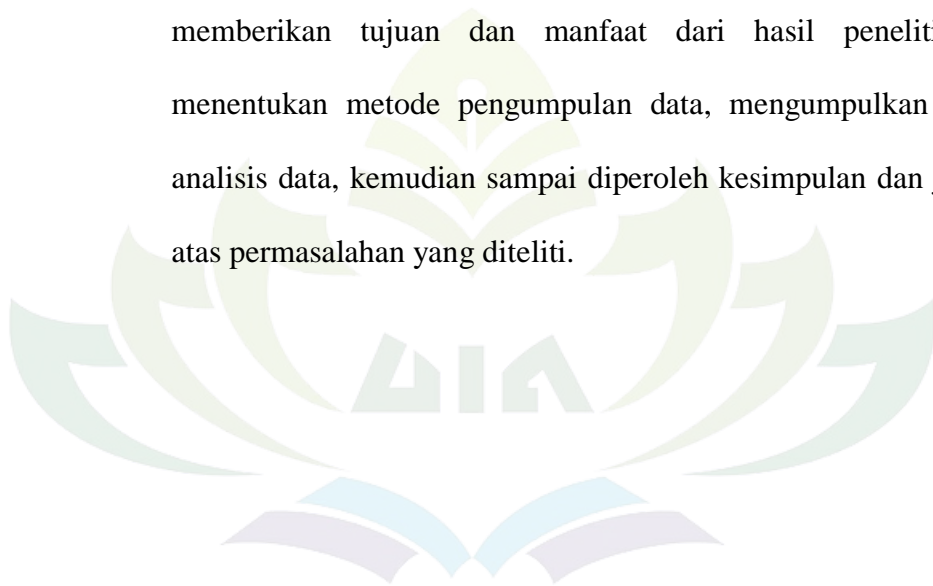
---

<sup>17</sup> Rufaidah, *Model Penelitian Agama dan Dinamika Sosial, Himpunan Rencana Penelitian* (Jakarta; PT. Grafindo Persada, 2002), h.95.



diperbolehkannya melakukan perceraian berdasarkan perfektif Hukum Islam dan Hukum Positif yang tertuang dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 Jo PP Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 secara lebih mendalam dan mencari jawaban atas suatu permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ilmiah ini.

Penulis memulainya dari tahapan merumuskan masalah, memberikan tujuan dan manfaat dari hasil penelitian ini, menentukan metode pengumpulan data, mengumpulkan metode analisis data, kemudian sampai diperoleh kesimpulan dan jawaban atas permasalahan yang diteliti.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pengertian Perceraian Menurut Hukum Islam

##### 1. Pengertian Perceraian menurut Hukum Islam

Islam telah mengatur segala sesuatu dalam Al-Quran tidak hanya aturan dalam beribadah, seperti sholat, zakat, puasa, haji dan lain-lain, Islam juga memberi aturan pada manusia dalam kehidupannya bersosialisasi. Bahkan, Al Quran juga mengatur adab dan aturan dalam rumah tangga, termasuk bagaimana jika ada masalah yang tak terselesaikan dalam rumah tangga tersebut. Dalam fiqh Islam, perceraian atau thalak berarti "Bercerai lawan dari berkumpul " Kemudian kata ini dijadikan Istilah oleh ahli Antar fiqh yang berarti pereraian suami istri. Sedangkan para ulama memberikan definisi perceraian yaitu sebagai berikut:

a. Sayid sabiq

“Thalak adalah melepaskan ikatan atau bubarnya suatu ikatan perkawinan”<sup>1</sup>

b. Abdur rahman al-jaziri

Menurut abdurahman al-jaziri thalaq yaitu lepasnya suatu ikatan perkawinan dalam hal ini yaitu hilangnya ikatan atau adanya suatu batasan sesuatu yang dihalalkan dan tidak sah lagi melakukan

---

<sup>1</sup> Azizah Linda, *Anallisis Perceraian menurut Hukum Islam*, Jurnal Al-Adalah, Vol.X, No.14 : 2014

hubungan sebagai suami istri disertai dengan adanya kata-kata tertentu.<sup>2</sup>

c. Al-hamdani

“Bercerai adalah lepasnya ikatan dan berakhirnya suatu hubungan perkawinan”<sup>3</sup>

Allah memang mengizinkan melakukan perceraian apabila tidak ada jalan keluar dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga akan tetapi Allah membenci perbuatan tersebut sesuai dengan firman Allah S.W.T dalam dijelaskan dalam surat Al-Baqarah [2]: 227 disebutkan:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui (Q.S. Al-Baqarah [2] : 227)*

Ayat tentang hukum perceraian ini berlanjut pada surat Al-Baqarah ayat 228 hingga ayat 232. Aturan-aturan mengenai hukum talak, masa iddah bagi istri, hingga aturan bagi wanita yang sedang dalam masa iddah nya Dijelaskan dalam ayat-ayat surat Al-Baqarah 227-232, serta dijelaskan pula dalam firman Allah ;

---

<sup>2</sup>Ibid, h.5.

<sup>3</sup> Ibid, h.,6.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقَ ثُمَّ النِّسَاءَ فَطَلَّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا أَلَّ عِدَّةً  
وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ  
يَأْتِيَنَّ بِفُحْشَةٍ مُبَيَّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ  
ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ۚ

Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru (At-Thalaq [65] : 1)

Dari sini kita bisa mengetahui bahwa agama Islam ini sangat memperhatikan kemaslahatan pihak suami dan istri dan mencegah adanya kerugian di salah satu pihak, dengan memberi aturan yang sangat lengkap tentang hukum perceraian.

## 2. Dasar Hukum Perceraian

Pada dasarnya Islam telah mempersempit pintu perceraian dalam hubungan ini hadits nabi riwayat Abu Dawud Dan Ibn Majjah mengajarkan: “hal yang halal, yang paling mudah mudah mendatangkan murkanya adalah thalak” *al-qurtubi* dalam kitab tafsir ayat-ayat hukum mengutip hadits nabi berasal dari ali bin abi thalib yang mengajarkan: “kawinlah kamu, tetapi jangan suka thalak, sebab talak itu

menggoncangkan “arsy”. Dari banyak hadits-hadits nabi mengenai thalak itu, dapat kita peroleh ketentuan bahwa aturan thalak diadakan guna mengatasi hal-hal yang telah amat mendesak dan terpaksa. Dijelaskan dalam dalam hadits nabi :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ  
الطَّلَاقِ (رواه ابو داود)

*Dari Ibnu Umar ra bahwa Rasulullah SAW bersabda suatu perbuatan halal yang amat dibenci allah azza wa zalla adalah thalak (perceraian)”.  
(H.R. Abu Dawud: 2178).<sup>4</sup>*

Serta dijelaskan pula dalam hadits lain :

إِنَّ إِبْلِسَ يَضَعُ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ ثُمَّ يَبْعَثُ سَرَايَاهُ فَأَذْنَاهُمْ مِنْهُ مَنْزِلَةً أَعْظَمُهُمْ  
فِتْنَةً يَحْيِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا فَيَقُولُ مَا صَنَعْتَشَيْئًا قَالَ ثُمَّ يَحْيِيءُ  
أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ مَا تَرَكْتُهُ حَتَّى فَرَّقْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ قَالَ فَيُذْنِيهِ مِنْهُ وَيَقُولُ نَعَمْ  
أَنْتَ

*Sesungguhnya Iblis meletakkan singgasananya di atas air kemudian mengirim pasukannya (ke berbagai penjuru). Pihak yang terdekat kedudukannya dari Iblis adalah yang paling besar menimbulkan fitnah. Salah satu dari mereka datang (menghadap Iblis) dan menyatakan: Aku berbuat demikian dan demikian. Iblis menyatakan: engkau belum berbuat apa-apa. Kemudian datang satu lagi (melaporkan): Aku tidak tinggalkan ia (manusia) hingga aku pisahkan ia dengan istrinya. Kemudian Iblis*

<sup>4</sup> Al-Iman Al-Hafiz Abi Daud Sulaiman Ibn Al-Asy'ats Al-Sajistani, *Sunan Abi Daud*, Juz II, (Indonesia: Maktabah Dahlan,), h. 154-155.



*mendekatkan kedudukannya dan mengatakan: bagus engkau* (H.R.Muslim : 2167).<sup>5</sup>.

Dasar hukum talak Hukum perceraian dalam Islam bisa beragam bisa bernilai wajib, sunnah, makruh, mubah, hingga haram. Berdasarkan akar masalah, proses mediasi dan lain sebagainya, perceraian. Berikut ini akan dibahas perincian hukum perceraian dalam Islam.

#### a. Perceraian Wajib

jika pasangan suami istri tersebut tidak lagi bisa berdamai setelah adanya dua orang wakil dari pihak suami dan istri, permasalahan rumah tangga tersebut tidak kunjung selesai dan suami istri tidak bisa berdamai Bahkan, Biasanya, masalah ini akan dibawa ke pengadilan dan jika Mereka berdua sudah tidak lagi memiliki jalan keluar lain selain bercerai untuk menyelesaikan masalahnya serta pengadilan memutuskan bahwa talak atau cerai adalah keputusan yang terbaik, maka perceraian tersebut menjadi wajib hukumnya.

#### b. Perceraian Sunah

Perceraian bisa dijatuhi hukum sunah apabila suami tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan istri tidak mampu menjaga martabatnya sebagai suami, dan tidak mampu untuk membimbing dan mengarahkan istrinya maka hukum melakukan perceraian bisa dihukumi sunah.

---

<sup>5</sup>HR. Bukhari, Muslim. *Lihat Shahih Bukhari, muslim*, (Beirut dar al fikr, 1981), Jus V, Hal,116

c. Perceraian Makruh

Perceraian dapat bernilai hukum makruh dapat disebabkan oleh beberapa hal misalnya seperti sudah tidak adanya keinginan suami dalam hal nafsu syahwat untuk berhubungan sebagai suami istri maka dapat dijatuhi hukum makruh

d. Perceraian Mubah

Ada beberapa sebab tertentu yang menjadikan hukum bercerai adalah mubah. Misalnya, ketika suami sudah tidak lagi memiliki keinginan nafsunya atau ketika istri belum datang haid atau telah putus haidnya.

e. Perceraian Haram

Ada kalanya perceraian yang dilakukan memiliki hukum haram dalam Islam. Hal ini terjadi jika seorang suami menceraikan istrinya pada saat si istri sedang haid atau nifas, atau ketika istri pada masa suci dan di saat suci tersebut suami telah berjimak dengan istrinya. Selain itu, seorang suami juga haram untuk menceraikan istrinya jika bertujuan untuk mencegah istrinya menuntut hartanya. Tidak hanya itu, diharamkan juga untuk mengucapkan talak lebih dari satu kali.

### 3. Sebab Putusnya Suatu Ikatan Perkawinan Dalam Islam

Dalam surat At-Thalaq ayat 1-7 juga dibahas aturan-aturan dalam berumah tangga, Di situ disebutkan tentang kewajiban suami terhadap istri hingga bagaimana aturan ketika seorang istri berada dalam masa iddah. Dari beberapa ayat yang telah dibahas, maka kita ketahui bahwa

dalam Islam perceraian itu tidak dilarang, namun harus mengikuti aturan-aturan tertentu.

Pada hakikatnya suatu perkawinan itu bertujuan membentuk keluarga yang utuh antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang kemudian diikad dengan adanya lafadz tertentu dalam hal ini yaitu akad dalam pernikahan. Pernikahan dilakukan untuk waktu yang sangat lama sampai matinya salah seorang suami atau istri, inilah sebenarnya yang dikehendaki agama Islam. Namun dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang menghendaki adanya permasalahan yang terjadi selama membangun biduk rumah tangga dan tak jarang dalam kenyataan hidup yang sebenarnya suatu perkawinan itu dapat putus karena adanya perceraian, jika perceraian ini apabila dilanjutkan akan mendapat banyak kemudharatan maka dalam hal ini jalan terakhir yang dianjurkan dalam agama Islam yaitu melakukan perceraian sebagai jalan keluar yang terbaik. Putusnya perkawinan dalam hal ini berarti berakhirnya hubungan antara suami-istri sehingga terputuslah ikatan perkawinan tersebut. Dalam hal ini terdapat empat kemungkinan terputusnya suatu ikatan perkawinan:

1. Putusnya perkawinan disebabkan atas kehendak allah swt yaitu putusnya perkawinan karena kematian salah satu diantara suami atau istri
2. Putusnya perkawinan atas kehendak dari suami dengan adanya ucapan tertentu yang diucapkan suami terhadap istrinya yang dapat

disebabkan karena alasan-alasan tertentu sehingga dapat memutuskan hak-hak yang dimiliki suami terhadap istrinya dalam hal ini disebut cerai talak

3. Putusnya perkawinan atas kehendak dari istri yang didasari oleh alasan-alasan tertentu karena istri menghendaki putusnya ikatan perkawinan tersebut sedangkan sang suami tidak berkehendak untuk itu dan kemudian membayar uang ganti rugi dan diterima oleh suami sehingga istri mengajukan gugatan cerai kepada pengadilan agama, dalam hal ini disebut dengan khulu.
4. Putusnya perkawinan yang disebabkan oleh putusan pengadilan (hakim) setelah melihat adanya sesuatu pada suami atau istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu untuk dilanjutkan.<sup>6</sup>

Putusnya perkawinan menurut hukum Islam ini disebut dengan thalak yang memiliki beberapa definisi mengenai talak ini. Lepasnya ikatan perkawinan adalah pengakhirannya dengan kehendak suami, atau keputusan *qadhi*. *Alfur'qah* menurut bahasa memiliki makna *al-iftiraaq* (berpisah), jamaknya adalah *furaq*, sedangkan menurut istilah adalah terlepasnya ikatan perkawinan dan terputusnya hubungan perkawinan di antara suami dan istri akibat salah satu dari beberapa sebab. Secara harfiah talak itu memiliki arti lepas dan bebas<sup>7</sup>. Sedangkan arti thalak

---

<sup>6</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqih Munakahat Dan UU Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Prcanada Group), H.165

<sup>7</sup> *Ibid*, h.22

secara terminologis ulama memberikan beberapa definisi yang berbeda-beda namun memiliki esensi yang sama yaitu sebagai berikut:

Al-mahalli dalam kitabnya syarh minhaj al-thalibin menjelaskan thalak Melepaskan hubungan pernikahan dengan menggunakan lafadz yang sejenis.

Mazhab Hanafi menurut mazhab berpendapat penjatuhan talak boleh dilakukan berdasarkan kemutlakan ayat Al-Qur'an seperti firmanNya, dalam surah At-Thalaq [65]:1

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

*Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) [1481] dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang[1482]. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri.kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru (Q.S. At-Talaq [65] : 1)*

#### 4. Macam-Macam Thalak

Kita telah sedikit mengetahui bahwa perceraian atau talak bisa dilakukan oleh suami, atau istri yang menuntut cerai suaminya.Terkadang dalam membangun bahtera rumah tangga yang diharapkan bahagia malah justru sebaliknya pernikahan tersebut harus kandas ditengah jalan dan



berakhir dengan perceraian. Berikut ini akan dibahas jenis-jenis cerai yang bisa dibedakan dari siapa kata cerai tersebut terucap.

#### 1. Cerai Talak oleh Suami

Perceraian ini yang paling umum terjadi, yaitu si suami yang menceraikan istrinya. Hal ini bisa saja terjadi karena berbagai sebab. Dengan suami mengucapkan kata talak pada istrinya, masa saat itu juga perceraian telah terjadi, tanpa perlu menunggu keputusan pengadilan.<sup>8</sup>

##### a. Talak *Raj'i*

Talak thalak *raj'i* ialah thalak yang memungkinkan suami rujuk kepada bekas istrinya tanpa perlu adanya akad nikah baru. Termasuk dalam kategori thalak *raj'i* adalah thalak pertama dan kedua yang dijatuhkan suami terhadap istrinya yang pernah dicampuri dan bukan atas permintaan atas permintaan istri yang disertai dengan uang tebusan (*iwadl*) selama masih dalam masa *iddah*. Namun, jika masa *iddah* telah habis, suami tidak boleh lagi rujuk kecuali dengan melakukan akad nikah baru. Sesuai dengan Firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah [2]: 229

##### b. Talak *Bain*

Thalak *bain* adalah thalak yang tidak memungkinkan suami rujuk kepada bekas istrinya, kecuali dengan adanya akad nikah baru setelah istri menikah lagi dan sudah melakukan hubungan suami istri dan setelahnya mereka bercerai maka mantan suami tersebut dapat kembali

---

<sup>8</sup>Zainudin ibn Abdu al-Aziz al-Malibari, *Fath al-Mu'in bi Syarh Qurrah al-Aini*, (Surabaya: Bengkulu Indah, tt), h. 112.

lagi dengan adanya akad nikah baru setelah bekas istri selesainya masa iddahnya. Sesuai dengan firman Q.S. Al-Baqarah [2]: 230 :

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۚ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

....Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.(Q.S.Al-Baqarah [2] :230).

Thalak *bain* ini terbagi menjadi dua pertama, thalak *bain sughra* (talak *bain* kecil) kedua, thalak *bain kubra* (besar) yaitu sebagai berikut:

#### 1) Thalak *bain sughra* (kecil)

Thalak *bain sughra* ialah thalak satu atau dua yang dijatuhkan kepada istri yang belum pernah digauli, thalak satu atau dua yang dijatuhkan kepada istri atas permintaan sang istri dengan adanya pembayaran tebusan (*iwadl*) dan penjatuhan thalak satu atau dua kepada istri yang pernah digauli tetapi bukan atas kemauan sang istri dan tidak dikenakan pembayaran tebusan (*iwadl*), setelah habis masa iddahya.

#### 2) Thalak *bain kubra* (besar)

Thalak *bain kubra* adalah ucapan atau perkataan suami untuk menjatuhkan thalaq yang ketiga kepada istrinya sehingga suami telah terputus dalam hubungan pernikahan dengan istrinya dan tidak dapat kembali lagi kecuali istri yang telah dithalaqnya tersebut telah

menikah kembali , kemudian terjadi perceraian tanpa adanya rekayasa dalam perceraian tersebut tidak boleh direncanakan terlebih dahulu sebelumnya. Dalam hal ini telah dijelaskan pula dalam hadits nabi riwayat ahmad, abu dawud, thurmudzi, nasa'i dan ibnu majjah dan ali memperingatkan: “Allah mengutuklaki-lakii *muhallil* (mengawini perempuan untuk menghalalkan perkawinan kembali dengan bekas suaminya lama) dan laki-laki yang menyuruh orang lain kawin sebagai *muhallil*.<sup>9</sup>

c. Talak *Sunni*

Talak *sunni* ini adalah thalak yang dijatuhkan suami kepada bekas istrinya ketika suami mengucapkan cerai talak kepada istrinya dan belum adanya hubungan badan kobla dukhul masih suci .

d. Talak *Bid'i*

Thalak yang diucapkan suami saat istrinya sedang dalam keadaan haid atau ketika istrinya sedang suci namun sudah disetubuhi. Zihar suatu ikatan perkawinan dapat putus dikarenakan zihar, zihar merupakan kebiasaan di kalangan bangsa arab jahiliah yaitu suami yang menjatuhkan thalak kepada istrinya dengan menyerukan atau menyamakan bagian tubuh tertentu dalam hal ini adalah bagian punggungnya seperti ibunya, berarti memandang mahram yang tidak halal untuk dikawini, Suami yang mengatakan demikian kepada istrinya berarti ia telah menceraikan istrinya.

---

<sup>9</sup>*Ibid*, h,16

Untuk menghentikan kebiasaan demikian Allah berfirman dalam Q,S. Al-Mujadalah 2-4 bahwa kata-kata tersebut tidak patut diucapkan kepada istrinya. *Li'an* juga dapat memutus suatu ikatan perkawinan *li'an* yaitu tuduhan suami kepada istrinya dengan mengucapkan sumpah atau disertai kalam Allah dan menuduh istrinya telah berbuat zina dengan lelaki lain padahal tidak mempunyai saksi kecuali dirinya sendiri.

e. Talak *Talik*

Di Indonesia berlaku ketentuan bahwa setelah melakukan akad nikah suami mengucapkan beberapa hal yang dapat menjadi alasan istri untuk minta dinyatakan telah dithalak suaminya dengan pembayaran *iwadl*. Pada talak *talik*, seorang suami akan menceraikan istrinya dengansyarat-syarat tertentu. Dalam hal ini, istri dapat mengadukan kepada pengadilan agama atau petugas-petugas lain yang ditunjuk apabilapengaduannya dibenarkan, maka istri membayar *iwadl* yang telah ditetapkan, jika syarat atau sebab yang ditentukan itu berlaku, maka terjadilah perceraian atau talak.

f. Thalak Dengan *Ila'*

Dalam hukum Islam juga putusnya suatu perkawinan atau jatuhnya thalak kepada istri melalui thalak dengan *ila'* yang dimaksud thalak dengan *ila'* adalah suatu pernyataan atau sumpah yang diucapkan suami kepada istrinya untuk tidak mencampuri atau menggauli istrinya selama empat bulan atau lebih dengan mengucap asma Allah,

atau dengan salah satu sifat-sifatnya. Atau dengang ta'lik yang amat sukar terlaksana apabila suami menggauli istrinya, hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Baqarah [2]: 226-227

## 2. Gugat Cerai Istri

Putusan perceraian juga dapat diputus melalui putusan pengadilan karna adanya keinginan istri untuk bercerai kemudian mengajukan gugatannya kepengadilan agama stempat dan kemudian ditrima oleh pengadilan agama sehingga perceraian yang didasari atas kemauan dan digugat oleh istri, Berbeda dengan talak yang dilakukan oleh suami, namun terkadang perceraian juga didasari atas kehendak keduanya untuk mengajukan gugatan cerai kepengadilan agama. gugat cerai istri ini harus menunggu keputusan dari pengadilan. Perceraian yang didasari atas kemauan istri disebut *fasakh* dan perceraian karena adanya kesepakatan antara kedua belah pihak disebut dengan *khulu'*.

## 3. *Fasakh*

*Fasakh* juga dapat menyebabkan suatu putusnya ikatan perkawinanfasakh sendiri menurut bahasa berarti merusak atau membatalkan jadi *fasakh* sebagai salah satu sebab putusnya perkawinan ialah merusak atau membatalkan perkawinan yang telah berlangsung. Putusnya suatu ikatan perkawinan karna fasakh atau adanya pembatalan perkawinan ini dapat disebabkan karena alasan-alasan tertentu seperti suami tidak melunasi mahar yang telah disebutkan pada saat akad nikah, suami atau istri mengalami penipuan



baik memiliki cacat badan atau riwayat sakit dan diketahui setelah pernikahan terjadi, meninggalkan istri selama 4 bulan lamnya maka pernikahan tersebut dapat dijatuhi fasakh.

#### 4. *Khulu'*

*Khulu'* adalah perceraian yang merupakan buah kesepakatan antara suami dan istri dengan adanya pemberian sejumlah harta dari istri kepada suami atau dengan kata lain *khulu'* adalah thalak yang dijatuhkan suami kepada istrinya atas kehendak istri dengan pembayaran sejumlah harta kepada suami. Jumhur fuqaha' berpendapat *khulu'* itu dipandang sesuai dengan *thalak bain*. Setelah terjadinya *khulu'*, maka suami dapat kembali lagi kepada istrinya dengan akad nikah baru meskipun istri masih dalam masa iddahnya. Berbeda pendapat dengan Imam Ahmad Daud Zhahiiri juga dengan Ibn Abbas Utsman dan Umar, mereka berpendapat bahwa *khulu'* itu bukan thalak tapi fasakh (meneruskan nikah) menurut pendapat kedua ini *khulu'* tidak mempengaruhi bilangan thalak yang menjadi hak suami. Terkait dengan hal ini terdapat pada surat Al-Baqarah [2] 229 :

مِمَّا تَأْخُذُوا أَنْ لَكُمْ تَحِلُّ وَلَا بِإِحْسَنِ تَسْرِيحٍ أَوْ بِمَعْرِوْفٍ فَإِمْسَاكٌ مَّرَّتَانِ الطَّلَاقُ  
حُدُودٌ يُقِيمَا إِلَّا خِفْتُمْ فَإِنَّ اللَّهَ حُدُودٌ يُقِيمَا إِلَّا تَخَافَا أَنْ إِلَّا شَيْئًا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ  
يَتَعَدَّ وَمَنْ تَعَتَدُوهَا فَلَا إِلَهَ حُدُودٌ تِلْكَ بِهِ أَفْتَدَتْ فِيهَا عَلَيْهِمَا جُنَاحٌ فَلَا إِلَهَ  
لِظَلْمِهِمْ هُمْ فَأُولَئِكَ اللَّهُ حُدُودٌ

*Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah. SWT, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim". (Q.S Al-Baqarah [2] : 229)*

#### 5. Nusyuz

Secara bahasa *nusyuz* berarti seorang perempuan yang durhaka terhadap suaminya dengan jalan yang tidak melaksanakan apa yang Allah wajibkan padanya, yakni taat pada sang suami, selain haram *nusyuz* mengakibatkan konsekuensi hukum berupa terputusnya nafkah.

#### 6. Syiqaq

*Syiqaq* merupakan perselisihan yang berawal dan terjadi pada kedua belah pihak suami dan istri secara bersama-sama. Dengan demikian, *Syiqaq* berbeda dengan *Nusyuz*, yang perselisihannya hanya berawal dan terjadi pada salah satu pihak, yaitu dari pihak suami atau istri. *Syiqaq* secara bahasa berarti perselisihan, perpecahan, dan permusuhan. Perselisihan yang berkepanjangan dan meruncing antarsuami dan istri, perselisihan antara suami dan istri yang didamaikan oleh dua orang hakim.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Intermasa, 1997) h.1700

## **B. Tinjauan Pustaka**

Untuk menghindari adanya plagiarisme dalam penelitian ini maka penelitian ini maka penulis memaparkan beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki kesinambungan dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Mohammad ridwan hakim dalam skripsinya dengan judul :

Perceraian Karena Faktor Ekonomi Studi Kasus Di Pengadilan Agama Indramayu Tahun 2011 penelitian ini dibuat dalam rangka memenuhi persyaratan menempuh gelar sarjana strata satu pada kampus IAIN Syekh Nurjai Cirebon Fakultas Syari'ah Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsyah. Mohammad ridwan hakim dalam penelitian ini meneliti permasalahan yaitu cerai gugat yang diajukan istri terhadap suaminya dengan alasan rendahnya faktor ekonomi. Dalam penelitian ini mohammad ridwan hakim menganalisis dan meninjau pertimbangan hukum terhadap putusan yang diberikan hakim pengadilan agama indramayu mengenai perkara cerai gugat dengan alasan faktor ekonomi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat perceraian di pengadilan agama indramayu terus meningkat. Dengan demikian terlihat jelas bahwa faktor ekonomi terhadap perceraian begitu besar. Dengan kata lain faktor ekonomi sangat

berpengaruh terhadap terjadinya perceraian yang terjadi di kabupaten indramayu pada tahun 2011.<sup>11</sup>

2. Muhammad David Aminuddin dalam skripsi nya dengan judul :  
 Faktor Ekonomi sebagai alasan perceraian ( studi penafsiran hakim dalam perkara cerai gugat no: 1379/Pdt.G/2012/PA.Mlg Studi Kasus Di Pengadilan Agama Malang Tahun 2013 penelitian ini dibuat dalam rangka memenuhi persyaratan menempuh gelar sarjana strata satu pada kampus UIN Malik Ibrahim Malang fakultas syari'ah program studi al-ahwal al-syakhsyah. Dalam penelitian ini Muhammad David Aminuddin tentang pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai gugat tersebut dalam penelitian ini Muhammad David Aminuddin berpendapat bahwa hakim memutus perkara gugat cerai karena faktor ekonomi ini karena telah sesuai dengan konsep maqashid syari'ah yaitu: menolak kerusakan, yaitu menghilangkan kesusahan istri harus didahulukan. Oleh karena itu, perceraian sebagai maslahat untuk jalan keluar yang menghilangkan dalam menghilangkan kesusahan istri atas permasalahan rumah tangga yang tidak mungkin untuk diselesaikan.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup>Ridwan Hakim, Mohammad, *Perceraian Karena Faktor Ekonomi Studi Kasus Di Pengadilan Agama Indramayu*, IAIN Syekh Nurjai Cirebon Fakultas Syari'ah Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsyah., 2011

<sup>12</sup>David Aminuddin Muhammad, *Faktor Ekonomi sebagai alasan perceraian ( studi penafsiran hakim dalam perkara cerai gugat no: 1379/Pdt.G/2012/PA.Mlg Studi Kasus Di Pengadilan Agama Malang*, UIN Malik Ibrahim Malang Fakultas Syari'ah Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsyah, 2013

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qu'ran dan Hadit's

Abdurrahman *Al-Jaziri*, *Kitab Al-Fiqh 'ala Mazahib Al-Arba'ah*, Juz IV, (Kairo: Dar Al-Pikr).

Al-Hafiz Al-Iman Abi Daud Sulaiman Ibn al-Asy'ats al-Sajistani, *Sunan Abi Daud*, juz II, (Indonesia: Maktabah Dahlan)

Al-Syairazi *Al-Muhadzab*, (Beirut: Darul Kutub, Jilid III)

Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung: Diponegoro:2008)

### B. fiqh dan ushul fiqh

Ahmad Kuzri, *Perkawinan Sebagai Sebuah Ikatan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1995)

Ahmad Rhofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta, rajawali pers, 2015)

Ahmad Amrullah *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Gema Insane Press, 1996)

Ali Daud Muhammad, *Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Islam Di Indonesia*, (Dalam pembangunan no 2 tahun ke XII, Maret 1982

Amiur Nurrudin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta, Kencana 2004

Azhari Akmal Tarigan, *Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fiqh, UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Sampai KHI* (Jakarta: Kencana, 2004)

Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Intermasa 1997)

Djamil Latifa, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981)

Djonet Mawarti *Sejarah Nasional Indonesia Jilid III*, (Jakarta: Balai Pustaka Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 1984)

- H.Ma. Tihami, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013)
- Hamdani Al, *RIsalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2004)
- Hamka, *Sejarah Umat Islam Jilid Ii*,(Jakarta: Bulan Bintang, 1963).
- M.Zein Satria Effendi ,*Ushul Fiqih*, (Jakarta: Raja Wali pers, 2008).
- Madani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009).
- Mohammad Ridwan Hakim, *Perceraian Karena Faktor Ekonomi Studi Kasus Di Pengadilan Agama Indramayu*, IAIN Syekh Nurjai Cirebon Fakultas Syari'ah Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsyah, 2011
- Muhammad David Aminuddin, *Faktor Ekonomi sebagai alasan perceraian ( studi penafsiran hakim dalam perkara cerai gugat no: 1379/Pdt.G/2012/PA.MlgStudi Kasus Di Pengadilan Agama Malang*,UIN Malik Ibrahim Malang Fakultas Syari'ah Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsyah, 2013
- Maria Ulfa Subadyo, *Perjuangan Untuk Mencapai Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Ghalia Indah, 1992)
- Nani Suwondo, *Kedudukan Wanita Islam Dalam Hukum Dan Masyarakat*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992)
- Noer Deliar, *administrasi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali,1983)
- Said Agil Husin, *Hukum Islam Dan Pluralitas Sosial*, (Jakarta: Penamadani,; 2004).
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, jilid 6, (Bandung: Al-Ma'arif, 1980)
- Shalih bin Ghonim As-Sadlan, *Kesalahan-Kesalahan Istri*, (Jakarta : Pustaka Progresif, 2004)
- Slamet Abidin, *Fikih Munakahat II*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1995)
- Soetedjo R. Prawirohamidjodjo, *Pluralism Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*, (Surabaya: Universitas Airlangga Press, 1998,)
- Sosroatmojo Arso dan A. wait Aulawi, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975)



Sudarsono, *Hukum Perkawinan National*, (Jakarta: Renika Cipta, 1991)

Waridah Ernawati, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta Selatan : Imprint Kawan Pustaka, 1991)

Zainudin ibn Abdu al-Aziz al-Malibari, *Fath al-Mu'in bi Syarh Qurrah al-Aini*, (Surabaya: Bengkulu Indah)

### **C. Buku-Buku Penunjang**

Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian & Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002).

Mamang SangadjiEtta dan Sopiah, *Metodologi Penelitian* (Jogjakarta: CV Andi Offset, 2010).

*Pedoman Penulisan Skripsi*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2017/2018

Rufaidah, *Model Penelitian Agama dan Dinamika Sosial, Himpunan Rencana Penelitian* (Jakarta; PT. Grafindo Persada, 2002).

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015).

### **D. Hukum, Peraturan Pemerintah, dan Undang-Undang**

Mukhtar Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993).

Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, *Instruksi Presiden RI, Nomor I tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, 2000)

Indriaswati Dyah Saptaningrum, *Sejarah UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Pembakuan Peran Gender Dalam Presfektif Perempuan Untuk Keadilan*, (Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Untuk Keadilan, 2000)

Putusan Hakim Pengadilan Agama Pasuruan, sebagaimana dalam surat gugatan pada tanggal 08 April tahun 2009 dengan nomor perkara: 0116/Pdt.G/2009/PA.Pas.

### **C. Jurnal dan Sumber lain**

Azizah Linda, *Anallisis Peceraian menurut Hukum Islam*, Jurnal Al-Adalah, Vol.X,No.14 : 2014

### **E. Online Source**

<https://Islam.nu.or.id/post/read/108804/syarat-dan-ketentuan-jatuhnyatalak-atau-cerai-suami-istri>

